



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI WAMENA

Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya
Provinsi Papua Pegunungan 99511. www.pn-wamena.go.id, pn.wamenapapua@gmail.com

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI WAMENA

- A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Negeri Wamena**
- A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Wamena**
1. Profil Pengadilan meliputi :
 - a. Fungsi, Tugas dan Yuridiksi Pengadilan
 - b. Struktur Organisasi Pengadilan
 - c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan
 - d. Daftar nama pejabat struktural; dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Wamena yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK
 2. Prosedur Beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
 3. Biaya berperkara di Pengadilan Negeri Wamena
 4. Agenda Sidang
- A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat**
1. Hak-hak Para Pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan
 2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai
 3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai
 4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi
 5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi
 6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi
- A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan**
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang terdiri atas:
 - a. Nama program dan kegiatan
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau capaian program dan kegiatan
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya
 2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 3. Ringkasan Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 4. Ringkasan daftar asset dan inventaris (laporan BMN)
 5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undang terkait
- A.4. Informasi Laporan Akses Informasi**
- Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima

- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi
 - c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
 - d. Alasan penolakan permohonan informasi
- B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik Pengadilan Negeri Wamena tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat
- B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
- 1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi naskah
 - 2. Informasi dalam Buku Register Perkara
 - 3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara
 - 4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara
 - 5. Laporan penggunaan biaya perkara
- B.2. Informasi tentang Peraturan dan Kebijakan
- 1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena
- B.3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- 1. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan
 - 2. Profil Hakim dan Pegawai
 - 3. Data statistik kepegawaian
 - 4. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangan
 - 5. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
- C. Informasi yang Dikecualikan
- 1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai :
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan dan keamanan Negara
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
 - g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan rahasia pribadi
 - i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1 antara lain:
 - a. Informasi dalam proses musyawarah hakim
 - b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi
 - c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim dan pegawai
 - d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai
 - e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang dilaporkan yang belum diketahui publik
 - f. Catatan dan dokumentasi yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan dan
 - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Periode Januari – Desember 2026

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan Informasi	Penanggung Jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi	
						Aktif	Inaktif
1.	Profil Pengadilan	Kesekretariatan	Kasubag PTIP	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
2.	Prosedur Beracara	Kepaniteraan	Panmud Perdata	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
3.	Biaya Berperkara	Kepaniteraan	Panmud Perdata	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
4.	Agenda Sidang	Kepaniteraan	Panmud Perdata	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
5.	Pos Bantuan Hukum	Kepaniteraan	Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
6.	Pengaduan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
7.	Prosedur Memperoleh Informasi	Kepaniteraan	Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
8.	Program dan Kegiatan DIPA	Kesekretariatan	Kasubag Umum dan Keuangan	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
9.	SAKIP / LKJIP	Kesekretariatan	Kasubag PTIP	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
10.	Laporan Keuangan	Kesekretariatan	Kasubag Umum dan Keuangan	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
11.	Daftar Aset	Kesekretariatan	Kasubag Umum dan Keuangan	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
12.	Pengadaan Barang/Jasa	Kesekretariatan	Kasubag Umum dan Keuangan	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
13.	Laporan Informasi Publik	Kesekretariatan /Kepaniteraan	Kasubag PTIP & Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
14.	Putusan & Penetapan Pengadilan	Kepaniteraan	Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
15.	Informasi Perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
16.	Data Statistik Perkara	Kepaniteraan	Panmud Hukum	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
17.	Kebijakan Pimpinan	Kesekretariatan /Kepaniteraan	Panitera /Sekretaris	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
18.	Profil Hakim dan Pegawai	Kesekretariatan	Kasubag Kepegawaian & Ortala	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
19.	Data Statistik Kepegawaian	Kesekretariatan	Kasubag Kepegawaian & Ortala	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-
20.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Kesekretariatan /Kepaniteraan	Panitera /Sekretaris	5 Januari 2026 / PN Wamena	Soft Copy/ Hardcopy	6 Bulan	-

Penanggungjawab Informasi,

Ttd

PPID PN Wamena